

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengangguran merupakan masalah ketenagakerjaan yang sering dihadapi oleh setiap negara, khususnya negara berkembang seperti Indonesia. Masalah pengangguran ini memang selalu menjadi suatu persoalan yang perlu dipecahkan dalam perekonomian Negara Indonesia. Jumlah penduduk yang bertumbuh semakin besar setiap tahunnya membawa akibat bertambahnya jumlah angkatan kerja. Tingginya tingkat pengangguran dalam suatu negara dapat membawa dampak negatif terhadap perekonomian. Negara tersebut, menurut BPS sensus 2010 pengangguran didefinisikan sebagai orang yang masuk dalam angkatan kerja (15-54 tahun) yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya.

Pengangguran terjadi karena pertumbuhan angkatan tenaga kerja lebih tinggi dari pertumbuhan lapangan pekerjaan yang ada. Pengangguran merupakan salah satu indikator penting di bidang ketenagakerjaan, dimana tingkat pengangguran dapat mengukur sejauh mana angkatan kerja mampu diserap oleh lapangan kerja yang ada. Pengangguran yang dapat menjadi sumber utama kemiskinan, dapat memicu kriminalitas yang tinggi serta dapat menghambat pembangunan dalam jangka panjang (Artryan,2013).

Pengangguran dapat menyebabkan perekonomian menjadi tidak stabil, menghambat pertumbuhan ekonomi, serta menurunnya kesejahteraan masyarakat dan bahkan menyebabkan sosial ekonomi yang tidak stabil, politik dan akan menambah angka kemiskinan. Setiap bangsa berupaya untuk menjadi bangsa maju dan sejahtera. Upaya ini harus didukung oleh pembangunan, dimana pada masa

pasca perang dunia kedua pemikiran pada setiap negara selalu berupaya agar mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam setiap kebijakan pembangunannya guna mengejar ketertinggalannya dengan negara-negara lain.

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Permasalahan standar hidup yang rendah berkaitan pula dengan pendapatan yang rendah, perumahan yang kurang layak, kesehatan dan pelayanan kesehatan yang buruk, dan tingkat pendidikan masyarakat yang rendah sehingga berakibat pada rendahnya sumber daya manusia dan banyaknya pengangguran.

Masalah kemiskinan dihadapi semua negara di dunia terutama di negara berkembang, seperti Indonesia. Banyak dampak negatif yang disebabkan oleh kemiskinan selain timbulnya banyak masalah-masalah sosial, kemiskinan juga dapat mempengaruhi pembangunan ekonomi suatu negara. Kemiskinan yang tinggi akan menyebabkan biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan pembangunan ekonomi menjadi lebih besar yang secara tidak langsung akan menghambat pembangunan ekonomi di berbagai sektor sehingga pertumbuhan haruslah beriringan dan terencana mengupayakan terciptanya pemerataan kesempatan dan pembagian hasil-hasil pembangunan. Dengan demikian mereka yang tergolong miskin akan maju dan sejahtera.

Penyebab kemiskinan bermula pada teori lingkaran kemiskinan (*vicious circle of poverty*) dari Nurkse. Adanya keterbelakangan dan ketertinggalan SDM, ketidaksempurnaan pasar dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya

produktivitas. Rendahnya produktivitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang diterima yang akan berdampak pada rendahnya tabungan dan investasi yang berakibat pada rendahnya akumulasi modal sehingga penciptaan lapangan pekerjaan rendah.

Tabel 1.1
Tingkat Kemiskinan di Provinsi NTT
Tahun 2011-2021(persen)

Tahun	Tingkat Kemiskinan
2011	20.48
2012	20.41
2013	20.42
2014	20.61
2015	22.21
2016	22.19
2017	22.64
2018	21.35
2019	21.09
2020	20.90
2021	20.99

Sumber BPS NTT 2021

Berdasarkan tabel 1.1 di atas tingkat kemiskinan 11 tahun terakhir tidak stabil. Dimana pada tahun 2011 sebesar 20,48 persen pada tahun 2012 menurun sebesar 20,41 persen, pada tahun 2013 meningkat menjadi 20,42 persen, pada tahun 2014 meningkat sebesar 22,61 persen, pada tahun 2015 menurun sebesar 22,21 persen, pada tahun 2016 menurun sebesar 22,19 persen, pada tahun 2017 meningkat sebesar 21,64 pada tahun 2018 menurun sebesar 21,35 persen, pada 2019 menurun sebesar 21.09 persen, pada tahun 2020 meningkat sebesar 20.90 persen dan pada tahun 2021 sebesar 20.99 persen.

Tabel 1.2
Tingkat Pengangguran NTT Tahun
2011-2021(persen)

Tahun	Tingkat Pengangguran
2011	2.69
2012	2.89
2013	3.35
2014	3.26
2015	2.96
2016	3.34
2017	3.46
2018	3.22
2019	38.5
2020	4.28
2021	3.77

Sumber NTT Dalam Angka 2021

Berdasarkan tabel 1.2 diatas tingkat pengangguran 11 tahun terakhir tidak stabil. Dimana pada tahun 2011 sebesar 2,69 persen, pada tahun 2012 meningkat sebesar 2,89. persen, pada tahun 2013 meningkat sebesar 3,35 persen, pada tahun 2014 menurun sebesar 2,26 persen, pada tahun 2015 meningkat sebesar 2,96 persen, pada tahun 2016 meningkat sebesar 3,34 persen, pada tahun 2017 meningkat sebesar 3,46 persen, pada tahun 2018 menurun 3,22 persen, pada tahun 2019 meningkat 38,5 persen, pada tahun 2020 meningkat 4,28 persen, dan pada tahun 2021 menurun 3,77 persen.

Perubahan yang terjadi pada tingkat pengangguran di Provinsi NTT ini disebabkan oleh beberapa faktor pendorong, seperti sedikitnya peluang pekerjaan, tingkat pendidikan, jumlah penduduk yang terlalu tinggi dan bahkan dengan adanya penetapan upah minimum juga akan menambah angka pengangguran yang ada, dikarenakan para pengusaha atau perusahaan akan merasa terbebaskan. sehingga kemungkinan akan terjadinya kesulitan dalam pemberian upah terhadap karyawan atau dengan kata lain mengalami defisit, dampak tersebut juga akan dirasakan oleh

si pekerja atau karyawan, salah satunya yaitu terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan lebih buruknya lagi dengan tutupnya sebuah perusahaan atau relokasi ke daerah lain.

Perdebatan tentang upah minimum sering terjadi, dikarenakan adanya perselisihan antara pengusaha atau pelaku industri dengan para pekerja, para pekerja menginginkan kenaikan upah minimum yang berpihak kepadanya, sedangkan para pengusaha merasa akan merugikan usahanya dengan adanya kenaikan upah minimum tersebut. Perdebatan yang muncul menyangkut sejauh mana upah riil mengikuti pertumbuhan produktivitas dan kebutuhan terhadap penentu upah minimum regional, maka dari itu kebijakan hukum pemerintah dibidang pengupahan sangat penting bagi upaya peningkatan kesejahteraan pekerja (Sumarsono 2013). Penerapan upah minimum, terutama untuk negara yang memiliki jumlah penduduk yang tinggi akan mengakibatkan tingginya tingkat pengangguran. Hal tersebut terjadi dikarenakan pengangguran terbuka terjadi pada generasi muda yang baru saja menyelesaikan pendidikannya dan selanjutnya akan mencari kerja sesuai dengan keinginannya. Selain itu dengan adanya penerapan kebijakan upah minimum regional dan Undang-undang tentang ketenagakerjaan, bagi para pengusaha akan banyak menggunakan tenaga kerja kontrak, hal inilah yang akan menambah permasalahan pengangguran. Mengenai upah minimum regional, di Provinsi NTT masih merujuk pada ketentuan Upah Minimum Provinsi, yang ditetapkan oleh pemerintah Provinsi dan berdasarkan peraturan Gubernur Provinsi NTT.

Tabel 1.3
Tingkat Upah Minimum Regional Provinsi NTT
Tahun 2011-2021

Tahun	UMR (Rp)
2011	800.000
2012	850.000.00
2013	9.25.000.00
2014	1.110.000.00
2015	1.250.000.00
2016	1.425.000.00
2017	1.525.000.00
2018	1.660.000.00
2019	1.790.000.00
2020	1.950.000.00
2021	1.950.000.00

Sumber: BPS Provinsi NTT dalam angka 2021

Berdasarkan tabel 1.3 diatas menunjukkan bahwa tingkat Upah Minimum setiap tahun mengalami kenaikan, terlihat dari tahun 2011 sebesar Rp 800.000.00, tahun 2012 sebesar Rp 850.000.00, tahun 2013 sebesar Rp 925.000.00, tahun 2014 sebesar Rp 1.10.000.00, tahun 2015 sebesar Rp 1.250.000.00, tahun 2016 sebesar Rp 1.425.000.00, tahun 2017 sebesar Rp 1.525.000.00, tahun 2018 sebesar Rp 1.660.000.00, tahun 2019 sebesar Rp 1.795.000.00, tahun 2020 Rp 1.950.000.00, Peningkatan ini terus berkelanjutan sampai pada tahun 2021 sebesar 1.950.000, sehingga UMR Provinsi NTT ini menunjukkan bahwa, pemerintah Provinsi NTT mengambil langkah kebijakan yang tepat untuk mengurangi pengangguran yang memicu pada menurunnya angka kemiskinan di provinsi NTT.

Namun dengan meningkatnya kenaikan Upah Minimum pada setiap tahunnya, hanya Sebagian saja yang yang dapat memenuhi kebutuhan hidup layak. Hal ini terbukti dari meningkatnya angka pengangguran. Berdasarkan dari uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis**

Pengaruh Tingkat Pengangguran dan Upah Minimum Regional Terhadap Kemiskinan Di Provinsi NTT”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh Tingkat Pengangguran dan Upah Minimum Regional secara parsial terhadap Kemiskinan di Provinsi NTT?
2. Bagaimana pengaruh Tingkat Pengangguran, dan Upah Minimum Regional secara simultan terhadap Kemiskinan di Provinsi NTT?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh Tingkat Pengangguran, dan Upah Minimum Regional secara parsial terhadap Kemiskinan di Provinsi NTT
2. Untuk menganalisis pengaruh Tingkat Pengangguran, dan Upah Minimum Regional secara simultan di Provinsi NTT?

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Dapat menerapkan ilmu yang telah di pelajari selama masa perkuliahan aktif dan juga menjadikan penelitian sebagai sarana dalam mempermudah diterima bekerja kelak.

2. Bagi Universitas

Membantu Universitas Katolik Widya Mandira Kupang dalam membangun relasi dengan lembaga BPS, terutama BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Membantu Universitas Katolik Widya Mandira Kota Kupang dalam melakukan penelitian yang ada kaitanya dengan Pengaruh, Tingkat Pengangguran dan Upah Minimum Regional Terhadap Kemiskinan di Provinsi NTT.